

## ABSTRAK

Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan akan dilakukan penuntutan serta dikenakan sanksi apabila terbukti bersalah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam penerapannya terdapat kekeliruan sejak tahap penyusunan surat dakwaan yaitu tidak mendakwa Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penuntutan dan bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. Riset ini menggunakan jenis normatif dengan menerapkan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil riset ini, bagi Penuntut Umum hendaknya faktor kecermatan dan ketelitian perlu ditingkatkan karena seharusnya Penuntut Umum dalam perkara tersebut mendakwa Terdakwa sesuai dengan tiga tindak pidana yang dilakukan, yakni perzinahan yang diatur pada Pasal 284 KUHP, pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP, dan pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 KUHP yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (*concurus realis*), sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan adalah kumulatif. Akan tetapi, dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwa terkait hilangnya nyawa korban saja yang didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu kekeliruan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban karena tidak mendakwa Terdakwa sesuai pada tiga tindak kejahatan yang telah dilakukan.

Keywords: Penuntutan; Bentuk Surat Dakwaan; *Concurus Realis*

## **ABSTRACT**

*Every person who commits a crime will be prosecuted and subject to sanctions if proven guilty in accordance with applicable legal provisions. In case number 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, prosecution, which is the authority of the Public Prosecutor, in its implementation there was an error at the stage of drafting the indictment, namely not indicting the Defendant in accordance with the criminal act he committed. This research aims to determine the prosecution mechanism and the form of indictment used in case number 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. This research uses a normative type by applying approach methods in the form of a statutory regulation approach, a case approach and a conceptual approach. Based on the results of this research, the Public Prosecutor should increase the accuracy and thoroughness factor because the Public Prosecutor in this case should charge the Defendant in accordance with the three criminal acts committed, namely adultery as regulated in Article 284 of the Criminal Code, murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code, and Ordinary theft is regulated by Article 362 of the Criminal Code which is committed simultaneously (concurus realis), so the appropriate form of indictment to use is cumulative. However, in this case the Public Prosecutor only charged the loss of the victim's life which was charged in the form of alternative charges, therefore the Public Prosecutor's error in carrying out the prosecution harmed the sense of justice for the victim's family because he did not charge.*

*Keywords: Prosecution, Form of Indictment, Concurus Realis*

